

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: SUATU KAJIAN TEORITIS

FINANCING OF EDUCATION: A THEORETICAL STUDY

Ferdi W. P

Puslitjak, Balitbang, Kemendikbud

email: pompito2006@gmail.com

Diterima tanggal: 14/03/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 24/03/2013; Disetujui tanggal: 02/12/2013

Abstrak: Tujuan kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi: 1) faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan; 2) jenis biaya pendidikan; dan 3) model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kajian ini dilakukan dengan melakukan analisis deskriptif terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan biaya pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, antara lain: a) kenaikan harga; b) perubahan gaji guru; c) perubahan populasi dan kenaikan prosentasi anak di sekolah negeri; d) meningkatnya standar pendidikan; e) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; f) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi; g) adanya keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; dan h) belum ada model pembiayaan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam operasionalisasi biaya pendidikan; 2) jenis-jenis biaya pendidikan meliputi: a) biaya langsung; b) biaya tidak langsung; c) biaya pribadi; d) biaya masyarakat; e) monetary cost; dan f) non monetary cost; dan 3) model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien yaitu model human capital di mana aspek pembiayaan dapat mempengaruhi taraf produktivitas yang dapat mempengaruhi taraf pendapatan seseorang atau kelompok sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Kata kunci: biaya pendidikan, model dan efektivitas biaya pendidikan

Abstract: The purpose of this analysis are to: 1) determine the factors that influence the cost of education, 2) identify the types of costs of education, and 3) recommend education funding model which is more effective and efficient. The study was conducted with a descriptive analysis of the documents relating to the cost of education. The results of this analysis are: 1) The factors that influence the cost of education, among others: a) rising prices, b) changes in teacher's salaries; c) changes in population and increase in the percentage of children in public schools; d) increasing educational standards; e) the increasing age of children who leave school; f) the increasing demand for higher education; g) the existence of openness, participation, accountability in education from the planning, implementation and monitoring, and h) no financing models that can be used as a reference in the operationalization of the cost of education; 2) Identified the types of educational expenses include: a) direct costs; b) indirect cost; c) private cost; d) social cost; e) monetary cost; and f) non monetary cost; 3) The education funding model which has more effective and efficient is human capital model/approach where aspects of financing can affect the productivity level which then affects the level of income of a person or group may ultimately contribute to the pace of economic growth and development.

Keywords: education funding, model and education budget effectiveness

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia cenderung mengarah pada krisis multi dimensional yang terus membelenggu negara kita. Nampaknya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bangsa kita akan terbebas dari krisis tersebut. Hal tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu semakin berat beban hidupnya, terutama bagi golongan masyarakat yang status ekonominya kurang beruntung. Hal ini dapat dicermati dari segala jenis kebutuhan hidup yang semakin tidak terjangkau.

Masalah pendidikan misalnya, merupakan salah satu masalah bangsa yang belum dapat ditemukan solusinya secara tuntas. Jika kita mencermati dan ikuti perkembangan pendidikan khususnya dalam hal biaya pendidikan sampai saat ini, biaya tersebut dirasakan semakin mahal. Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi perekonomiannya dari hari ke hari. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau disebabkan oleh karena hal yang lainnya. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di tingkat pendidikan dasar misalnya, sekalipun Pemerintah telah memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP negeri, namun dianggap oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orangtua/wali peserta didik.

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Seharusnya pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD R.I Tahun 1945 bahwa tujuan Negara yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa". Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan

dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil guna. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program. Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang esensial demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4, ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003) bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Kata kunci tidak diskriminatif di sini berlaku untuk pembiayaan pendidikan, artinya bahwa pembiayaan pendidikan haruslah tidak mendiskriminatifkan setiap warga Negara yang memiliki keinginan untuk dapat mengikuti pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat UUSPN Nomor 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1). Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu: a) peningkatan potensi SDM yang berkualitas; b) penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan; c) penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana; d) pengefektifan dan pengefisiensian penggunaan dana; e) akutabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan; f) meminimalis

terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan.

Terkait dengan model pembiayaan pendidikan, Amhar (dalam Wibisono, 2006) berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) model pembiayaan pendidikan, yaitu: 1) subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi; 2) pendidikan gratis pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu; 3) pendidikan gratis diberikan sampai SMA, dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi; dan 4) semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri. Penggalan sumber dana dapat diperoleh dari upaya kerja sama dengan industri atau memanfaatkan bantuan CSR (*corporate social responsibility*), membentuk komunitas alumni, atau bersumber dari orangtua/wali peserta didik.

Berdasarkan uraian latar belakang kajian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) faktor-faktor apa yang mempengaruhi biaya pendidikan? 2) apa saja jenis biaya pendidikan? dan 3) model biaya pendidikan seperti apa yang dipergunakan sebagai acuan untuk operasionalisasi biaya pendidikan secara efektif dan efisien.

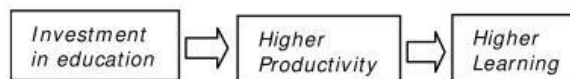
Mengacu pada permasalahan, maka tujuan kajian ini dimaksudkan untuk: 1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan; 2) mengidentifikasi jenis biaya pendidikan; dan 3) mengidentifikasi model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien.

Kajian Literatur dan Pembahasan Teori Ekonomi Pendidikan

Mengkaji biaya pendidikan, erat kaitannya dengan teori/konsep ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan pada hakikatnya merupakan "suatu kegiatan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa uang, untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak, dan lain-lain, terutama melalui sekolah formal dalam suatu jangka waktu dan mendistribusikannya, sekarang dan kelak, di kalangan masyarakat" (Samuelson, 1961). Pada hakikatnya, ekonomi pendidikan berkaitan

dengan: 1) proses pelaksanaan pendidikan; 2) distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang memerlukan; dan 3) biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan pendidikan, dan jenis kegiatan apa yang dibutuhkan.

Dari segi teori ekonomi pendidikan, khususnya melalui pendekatan *human capital* telah dikembangkan oleh Cohn (1979) dalam suatu model sebagai berikut.



Gambar 1. Pendekatan Human Capital dalam Pendidikan (Cohn, 1979)

Pendekatan *human capital* yang dikembangkan dalam bentuk model tersebut, aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Pada gilirannya taraf produktivitas ini mempengaruhi taraf perolehan (*earning*) seseorang atau kelompok, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Perencanaan Pendidikan

Beberapa pendapat terkait dengan perencanaan pendidikan, antara lain Coombs (1982) menyatakan bahwa perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional dianalisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat. Sementara itu, Enoch (1992) menyatakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu Negara.

Mengacu pada pendapat tersebut, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang, serta memutuskan dengan keputusan yang

diambil. Proses tersebut harus konsisten (taat asas) yang secara internal berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang tertentu maupun bidang lainnya, serta tidak ada batas waktunya.

Secara konsepsional, perencanaan pendidikan sangat ditentukan oleh cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampak terdapat banyak komponen yang ikut memproses di dalamnya. Adapun komponen-komponen yang ikut serta dalam proses tersebut, yaitu: 1) tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan; dan 2) masalah strategi, termasuk penanganan kebijakan (*policy*) secara operasional yang akan mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan.

Mulyadi (2005) mengemukakan bahwa dalam arti luas, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit, dapat dimaknai sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.

Sementara itu, Mulyadi (2002), berpendapat bahwa biaya merupakan kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang (kas atau setara kas), untuk memperoleh barang atau jasa yang bermanfaat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang.

Konsep biaya dalam bidang pendidikan memberikan pandangan bahwa lembaga pendidikan merupakan produsen jasa pendidikan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan. Lembaga pendidikan memperoleh *input* berupa sumber daya manusia yang kemudian diproses melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan untuk menghasilkan *output* yang mampu bersaing serta dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Ada beberapa pendapat lain tentang definisi biaya, seperti Gaspersz (2003) mendefinisikan biaya dalam ekonomi manajerial merupakan cerminan dari efisiensi sistem produksi, sehingga

konsep biaya juga mengacu pada konsep produksi, tetapi apabila pada konsep produksi kita membicarakan penggunaan input secara fisik dalam menghasilkan *output* produksi, maka dalam konsep biaya kita menghitung penggunaan input itu dalam nilai ekonomi yang disebut biaya. Sementara itu, Sunarto (2003) memaknai biaya sebagai harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, Gani (1989/1990) menyatakan bahwa biaya merupakan pengorbanan *sacrifice* yang bertujuan untuk memproduksi atau memperoleh suatu komoditi. Pengorbanan yang tidak bertujuan disebut pemborosan dan bukan termasuk biaya. Pendapat lainnya, Simamora (2002) bahwa biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi, dalam hal ini perusahaan. Adapun Prathama & Manurung (2002) memberi definisi khusus bagi akuntan bahwa biaya merupakan total uang yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu.

Atas dasar beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pengeluaran dalam satuan mata uang yang dikorbankan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Dengan kata lain, terdapat 4 (empat) unsur pokok dalam biaya, yaitu: 1) merupakan pengorbanan sumber ekonomi; 2) diukur dalam satuan uang; 3) telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi; dan 4) pengorbanan untuk tujuan tertentu.

Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 Pasal 31 "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, termasuk mahalannya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945.

Konstitusi (UU SPN Nomor 20/2003) mengamanatkan kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan misi Kemdiknas 5 (lima) K, yaitu: ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas dan relevansi layanan pendidikan; kesetaraan layanan pendidikan; dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya Pemerintah belum memiliki kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut dicicil/dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan komitmen peningkatan alokasi setiap tahunnya.

Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas SDM. Di sisi lain, prioritas alokasi pembiayaan pendidikan seyogyanya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hal aksesibilitas dan daya tampung. Oleh karena itu, dalam mengukur efektivitas pembiayaan pendidikan terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terarah penggunaannya.

Menurut Smith (1776), *Human Capital* yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Perolehan keterampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik *rate of return* yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Berdasarkan pendekatan *Human Capital* terdapat hubungan linier antara investasi pendidikan dengan *Higher Productivity* dan *Higher Earning*. Manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik. Dengan demikian, manusia yang memperoleh penghasilan lebih besar akan membayar pajak dalam jumlah yang besar, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan negara.

Peningkatan keterampilan yang dapat menghasilkan tenaga kerja yang produktivitasnya tinggi dapat dilakukan melalui pendidikan yang dalam pembiayaannya menggunakan efisiensi internal dan eksternal. Dalam upaya mengembangkan suatu sistem pendidikan nasional yang berporos pada pemerataan, relevansi, mutu, efisiensi, dan efektivitas dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan, namun dalam kenyataannya perlu direnungkan, dikaji, dan dibahas, baik dari segi pemikiran teoritis maupun pengamatan empirik.

Untuk dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, salah satu hal paling penting, yaitu mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis dan integratif antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mewujudkan kondisi ini, perlu dibangun rasa saling percaya, baik internal Pemerintah maupun antara Pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi kata-kata kunci untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal (Sulistyoningrum, 2010). Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Lebih lanjut, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi: a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya (Sulistyoningrum, 2010).

Jenis Biaya Pendidikan

Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan yang dikaji dalam artikel ini sebagai berikut.

Pertama, biaya langsung (*direct cost*) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Anwar dan Idochi, 1991). Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar-mengajar (Gaffar, 1991). Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri (Fattah, 2000).

Selanjutnya, berikut ini jenis-jenis biaya-biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung (*direct cost*), yaitu: 1) Biaya rutin (*recurrent cost*), merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.

Menurut Gaffar (1987) biaya rutin dihitung berdasarkan "*per student enrolled*". Menurutny, biaya rutin dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu: 1) rata-rata gaji guru per tahun; 2) ratio guru, murid dan proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin; dan 3) biaya pembangunan (*capital cost*), merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan mobelair, biaya penggantian dan perbaikan. Lebih lanjut, Gaffar (1987) menyatakan bahwa biaya pembangunan dihitung atas dasar "*per student place*". Menurutny, dalam menghitung biaya pembangunan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama: tempat yang menyenangkan untuk murid belajar, biaya lokasi atau tapak (*site*), dan biaya perabot dan peralatan. Kedua: biaya tidak langsung (*indirect cost*) dapat dimaknai sebagai biaya yang

umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (*earning foregone by students*), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (*cost of tax exemption*), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (*implicit rent and depreciation*) Fattah (2000). Selanjutnya, berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung (*indirect cost*), yaitu: 1) biaya pribadi (*private cost*), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya *foregone opportunities*. Dalam kaitan ini, Jones (1985) mengatakan "*In the context of education these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals*". Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu; 2) biaya masyarakat (*social cost*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Dalam kaitan ini, Thomas, H. Jones (1985) mengatakan "*Sometimes called public cost, the include cost of educations financed through taxation. Most public school expenses are examples of sosial costs*". Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat.

Ketiga, *monetary cost* adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Keempat, *non monetary Cost* adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal (Depdiknas, 2005). Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta

segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Adapun biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan (Depdiknas, 2005).

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Pasal 7 sampai dengan Pasal 30), pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu: 1) biaya investasi satuan pendidikan, meliputi: a) biaya investasi lahan pendidikan dan b) biaya investasi selain lahan pendidikan; 2) biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, meliputi: a) biaya investasi lahan dan b) biaya investasi selain lahan; 3) biaya operasi satuan pendidikan, meliputi: a) biaya personalia dan b) biaya non-personalia; 4) biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang meliputi: a) biaya personalia dan b) biaya nonpersonalia; serta 5) bantuan biaya pendidikan dan bea-peserta didik (Depdiknas, 2008).

Dalam perkembangannya, kebutuhan pendanaan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang cukup pelik untuk dikelola secara efektif dan efisien. Permasalahan pendanaan pendidikan erat kaitannya dengan keperluan operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan. Biaya tersebut, antara lain: 1) biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan (gaji dan honor/insentif/tunjangan); 2) proses pembelajaran dan penilaian; 3) pengadaan, perawatan, dan perbaikan/perawatan sarana-prasarana pendidikan; dan 4) manajemen.

Fungsi pembiayaan tidak dapat terpisahkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh karena itu, pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang harus disikapi dan dicarikan berbagai alternatif solusinya. Ketidakmampuan lembaga penyelenggara pendidikan untuk menyediakan pendanaan pendidikan akan menghambat proses operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Namun demikian, bukan jaminan manakala

tersedia biaya pendidikan yang memadai akan menjamin penyelenggaraan pendidikan berhasil lebih baik. Dalam memahami permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia, perlu memahami permasalahan apa saja yang timbul serta alternatif penyelesaiannya (Depdiknas, 2005).

Berdasarkan uraian klasifikasi biaya pendidikan, maka jelaslah bahwa biaya pendidikan memiliki pengertian yang luas. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Anwar (1991) bahwa hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam melakukan klasifikasi biaya pendidikan untuk mencapai tujuan yang dituju semua pihak yaitu kesuksesan pelaksanaan pendidikan.

Kondisi Pembiayaan Pendidikan

Masalah pendidikan di Indonesia ibarat benang yang kusut, sehingga ada kesulitan harus dari mana memulainya agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bukan hanya karena sistem pendidikan, tetapi dapat diduga pula dikarenakan oleh para pelaku penyelenggara pendidikan itu sendiri. Mirisnya lagi, yang dapat mengenyam pendidikan bermutu kebanyakan hanya orang-orang golongan atas, sementara orang-orang dari golongan bawah hanya bisa diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada realitanya, masih cukup banyak ditemui usia sekolah yang tidak bersekolah karena terbentur masalah biaya pendidikan yang mahal. Akibat kondisi tersebut, terjadi pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan di mana-mana. Kondisi ini mencerminkan bahwa keterjangkauan pembiayaan pendidikan masih jauh dari harapan masyarakat, sehingga perlu ada langkah yang tepat baik dari Pemerintah bersama masyarakat untuk mencari solusi yang tepat dalam menangani masalah pembiayaan pendidikan.

Saat ini, penerapan pembiayaan pendidikan belum dapat sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada peserta didik dari kalangan kurang beruntung dari segi ekonomi. Ke depan, diharapkan sistem pembiayaan pendidikan dapat mencerminkan ketercapaian mutu pendidikan.

Menyikapi tuntutan masyarakat dewasa ini terhadap mutu pendidikan yang tinggi, maka perlu mengadopsi sistem pembiayaan subsidi silang di mana dalam sistem tersebut diprioritaskan untuk siswa yang tidak memiliki akses kepada pendidikan karena secara ekonomi kurang mampu. Ini tercermin dalam Pasal 52 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan di mana salah satu ketentuannya menetapkan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah menerapkan sistem subsidi silang yang diatur tersendiri oleh satuan pendidikan (Depdiknas, 2008).

Berdasarkan hasil studi pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri yang dilakukan Fattah (1998) terungkap bahwa faktor-faktor internal sekolah memberikan kontribusi signifikan terhadap mutu pendidikan, yaitu: 1) kesejahteraan guru; 2) kemampuan guru; 3) sarana kelas; dan 4) buku-buku pelajaran. Keempat komponen tersebut dalam penyusunan RAPBS memerlukan skala prioritas dalam mendapatkan alokasi biaya.

Faktor eksternal pendidikan, seperti keadaan ekonomi orang tua murid, aspirasi keluarga sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi-prestasi siswa. Hal itu dibuktikan dari hasil studi, yang dilakukan oleh Fattah (1999) bahwa mutu pendidikan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah pedesaan yang keadaan sosial ekonominya kurang. Sekolah-sekolah yang memiliki orang tua murid dengan lingkungan keluarga mampu mempunyai fasilitas yang bermutu, guru lebih berkemampuan menciptakan pengelolaan belajar baik, yang memungkinkan siswa belajar lebih baik dan pada akhirnya prestasi muridnya jauh lebih baik.

Menurut Fattah (2006) melihat perkembangannya, anggaran mempunyai manfaat yang dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu: 1) sebagai alat penaksir; 2) sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan; 3) sebagai alat efisiensi. Anggaran sebagai alat efisiensi merupakan fungsi yang paling esensial dalam pengendalian. Dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka yang standar dibandingkan dengan realisasi biaya yang

melebihi atau kurang, dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau penghematan.

Peranan anggaran dalam pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan layanan belajar dan manajemen sekolah serta manajemen sekolah secara keseluruhan tentu sangatlah penting untuk mencapai tujuan. Anggaran pendidikan merupakan pola organisasi yang dirinci menjadi elemen-elemen dari rencana terpadu ke dalam komponen bagian atau departemen yang memudahkan biaya estimasi. Efisiensi pendidikan menggambarkan hubungan antara *input* dan *output* atau antara masukan dan keluaran. Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan, efisiensi pendidikan mempunyai kaitan antara penda-yagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi.

Penyusunan anggaran merupakan salah satu langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan anggaran dapat menggunakan sistem kombinasi yang merupakan sistem yang lebih baik, karena sistem penganggaran ini telah melalui proses pemilihan kebutuhan yang menjadi prioritas dengan anggaran yang telah ditentukan berdasarkan perkiraan. Metoda penetapan biaya dengan memperkirakan pengeluaran berdasarkan laporan lembaga-lembaga pendidikan, menggunakan SP4 (Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Pengajaran).

Dalam penggunaan anggaran harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) harus ada laporan dari biaya; 2) laporan harus dibuat secara uniform, yaitu dengan standar fungsional yang sama; dan 3) laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi lembaga itu. Biaya yang harus dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*) perhitungan biaya pendidikan ditentukan oleh kegiatan dan biaya satuan, meliputi gaji guru, sarana prasarana pembelajaran dan dukungan pembiayaan mencakup pengadaan dan pemeliharaan.

Pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah maupun masyarakat. Perlu dibangun rasa saling percaya, baik internal Pemerintah

maupun antara Pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata kunci untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan di Indonesia saat ini tidak murah lagi jika dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia setiap harinya. Masalah mahal biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi, melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat bantuan operasional sekolah (BOS). Namun semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Kompleksitas biaya yang timbul berdasarkan uraian di atas merupakan suatu proses yang secara bersama-sama harus ditelaah, diselesaikan, dan diharapkan dapat menghasilkan suatu model pembiayaan pendidikan yang terbaik sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Pendidikan

Menurut Iskandar (2011), lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu dalam hal biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya produksi. Produksi

pendidikan diartikan sebagai unit pelayanan khusus (*units of specific services*). Unit *output* harus meliputi dimensi waktu, seperti tahun belajar atau jam belajar agar biaya-biaya dalam mempersiapkan *output* dibandingkan *input*. *Input* meliputi barang-barang yang dibeli dan orang-orang yang disewakan untuk menyediakan jasa. Di antara masukan (*input*) yang penting dalam sistem bidang pendidikan ruang, peralatan, buku, material, dan waktu para guru dan karyawan lain. *Output* menjadi hasil tambahan yang diakibatkan oleh suatu kenaikan biaya pendidikan yang diterima di sekolah, sepanjang masukan (*input*) menjadi bagian dari biaya kenaikan. Suatu unsur biaya tambahan, yang ada dalam fungsi produksi yang terdahulu, menjadi biaya kesempatan dari peserta didik (Iskandar, 2011).

Analisis mengenai biaya produksi pendidikan pada dasarnya menggunakan model teori "*input-proses-output*" di mana sekolah dipandang sebagai suatu sistem industri jasa. Menurut Blaug (1992) dan (Idochi dan Anwar, 2004), kita menghadapi suatu kelemahan yang merembes pada fungsi produksi pendidikan, bahwa hubungan antara input sekolah di satu pihak, dan *output* sekolah di lain pihak secara konvensional diukur melalui skors-skors *achievement*."

Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: 1) kenaikan harga (*rising prices*); 2) perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's salaries*); 3) perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak di sekolah negeri; 4) meningkatnya standar pendidikan (*educational standards*); 5) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan 6) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (*higher education*).

Analisis Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang dirasakan masih krusial, Meskipun masalah pembiayaan seutuhnya tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan erat dengan kelancaran pembelajaran di sekolah, termasuk pengadaan sarana-prasarana dan sumber belajar. Berapa banyak sekolah yang tidak

dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi menghendaki pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, sekolah seharusnya mampu mengelola keuangan yang ada sehingga dapat menghindari penggunaan biaya yang tidak perlu/tidak direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Efektivitas pembiayaan merupakan salah satu alat ukur efisiensi, sehingga program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tetapi juga waktu, dan lebih amat penting lagi menghindari dan menyeleksi penggunaan dana operasional, pemeliharaan, dan biaya lain yang mengarah pada pemborosan.

Bobbit (1992) dalam Fatah (2009) berpendapat bahwa sekolah secara mandiri dan berkewenangan penuh mengelola anggaran biaya secara efisien. Sebagai contoh efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana-Bali. Kabupaten tersebut sejak tahun 2001 mampu memberikan pendidikan gratis 12 tahun bagi warga asli daerah tersebut. Pemerataan pendidikan, manajemen pendidikan yang efektif, dan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan pijakan dalam meluncurkan program pendidikan di Kabupaten Jembrana.

Contoh lain, implementasi konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) pada hakikatnya menampilkan konsep pengelolaan anggaran pendidikan dengan tujuan untuk menjawab persoalan bagaimana mendayagunakan sumber-sumber pembiayaan secara efektif dan efisien? serta bagaimana mengembangkan sumber-sumber baru pembiayaan bagi pembangunan pendidikan? agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Dalam kondisi dana yang sangat terbatas dan sekolah dihadapkan pada kebutuhan yang beragam, maka sekolah harus mampu membuat keputusan dengan tetap berpedoman pada peningkatan mutu. Manakala sekolah memiliki rencana untuk mengadakan perbaikan fasilitas

seperti pagar sekolah atau merencanakan pengadaan alat laboratorium, maka sekolah perlu mempertimbangkan prioritas mana yang diasumsikan memiliki pengaruh yang dominan terhadap peningkatan mutu proses belajar-mengajar. Apabila melalui berbagai pertimbangan dan atas dasar musyawarah dan mufakat dengan para pemangku kepentingan, pengadaan alat peraga laboratorium lebih memiliki dampak yang kuat, maka keputusan yang paling efisien mengadakan alat peraga laboratorium.

Efisiensi pendanaan pendidikan ditentukan oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor *input* pendidikan yang dapat memacu prestasi belajar peserta didik. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) merupakan suatu rancangan pembiayaan pendidikan di sekolah dalam rangka mengatur dan mengalokasikan dana pendidikan yang sumbernya sudah terkalkulasi jumlah dan besarnya, baik merupakan dana rutin bantuan dari Pemerintah berupa dana bantuan operasional atau dana lain yang berasal dari sumbangan masyarakat atau orang tua peserta didik.

Dalam merancang dan menyusun RAPBS ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya masalah efektivitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi. Efektivitas pembiayaan merupakan faktor penting yang senantiasa diperhitungkan bersamaan dengan efisiensi. Artinya, suatu program kegiatan tidak hanya menghitung waktu yang singkat, tetapi tidak memperhatikan anggaran yang harus dikeluarkan seperti biaya operasional dan dana pemeliharaan sarana yang mengarah pada pemborosan. Kepala Sekolah bersama-sama guru dan Komite Sekolah dalam menentukan anggaran pembelajaran harus berdasarkan kebutuhan yang riil dan benar-benar sangat dibutuhkan untuk keperluan dalam rangka menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu. (Ardiansyah, www.kabar-pendidikan.blogspot.com, www.kmp-malang.com; dan www.Arminaperdana.blogspot.com, <http://grosirlaptop.blogspot.com>).

Lebih lanjut, analisis biaya dalam pendidikan mencakup keefektifan biaya (*cost effectiveness*),

keuntungan biaya (*cost benefit*), kemanfaatan biaya (*cost-utility*), dan kesisibilitas biaya (*cost-feasibility*). Selanjutnya, secara rinci masing-masing analisis biaya diuraikan sebagai berikut: 1) Analisis keefektifan biaya. Suatu pekerjaan disebut efektif kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Biaya pendidikan digunakan secara efektif berarti biaya itu diarahkan hanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang ternyata sesudah selesai pekerjaan mendidik itu tujuan yang direncanakan semula benar-benar tercapai; 2) Analisis keuntungan biaya. Analisis ini menghubungkan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan besar pendapatan setelah menjalani pendidikan atau latihan; 3) Analisis kemanfaatan biaya adalah analisis yang berusaha membandingkan biaya yang digunakan oleh suatu alternatif dengan estimasi manfaatnya atau nilai *outcomenya*; dan 4) Analisis kesisibilitas biaya. Analisis ini tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti analisis sebelumnya, analisis ini hanya melihat apakah biaya yang dipakai oleh alternatif itu cukup atau tidak, bila dihubungkan dengan dana yang tersedia. Bila biaya alternatif melebihi dana dan sumber-sumber pendidikan lainnya, maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan, atau alternatif tersebut tidak fisibel.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Atas dasar hasil kajian secara teori dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: a) kenaikan harga (*rising prices*); b) perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's salaries*); c) perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak sekolah (negeri); d) meningkatnya standar pendidikan (*educational standards*); e) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan f) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (*higher education*). Faktor-faktor peningkatan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kurun waktu tertentu.

Kedua, beberapa jenis biaya pendidikan meliputi: a) biaya langsung (*direct cost*); b) biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya rutin dan

pembangunan merupakan bagian dari biaya langsung (*direct cost*); c) biaya pribadi (*private cost*); d) biaya masyarakat (*social cost*); e) *monetary cost*; dan f) *non monetary cost*. Jenis biaya yang masih sering dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik (biaya pribadi).

Ketiga, model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien serta dapat dikembangkan yaitu model pendekatan *human capital*. Saat ini Pemerintah hanya mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan di mana kedua peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai biaya pendidikan yang meliputi: a) biaya satuan pendidikan; b) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c) biaya pribadi peserta didik. Lebih lanjut, biaya satuan pendidikan terdiri atas: a) biaya investasi, yang terdiri atas: 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan 2) biaya investasi selain lahan pendidikan; b) biaya operasi, yang terdiri atas: 1) biaya personalia; dan 2) biaya nonpersonalia.

Saran

Mengacu pada simpulan, disarankan sebagai berikut. Pertama, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan/sekolah, maka penyelesaian masalah pembiayaan pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah, namun harus ditempuh berbagai langkah atau dengan tindakan yang strategis. Artinya, tidak hanya memperhatikan pada upaya untuk menaikkan anggaran pendidikan saja. Namun, kenaikan harga (*rising prices*) harus diimbangi dengan kenaikan sumber pendapatan; perubahan gaji guru (*teacher's salaries*) perlu adanya penetapan gaji standar yang sifatnya menyeluruh dan permanen; c) perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak sekolah (negeri) perlu diimbangi dengan meningkatnya jumlah satuan pendidikan di setiap kabupaten/kota; d)

meningkatnya standar pendidikan (*educational standards*) perlu diimbangi dengan mutu dan kualitas dari *output* pendidikan; e) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah perlu diterapkan sosialisasi mengenai arti pentingnya serta kesadaran masyarakat terhadap pendidikan lanjutan pada masa yang akan datang; dan f) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan tinggi (*higher education*) diimbangi dengan mutu, sarana prasarana, dan tenaga pendidikan itu sendiri.

Kedua, Jenis-jenis biaya yang telah disebutkan di atas memiliki hubungan keterkaitan (*linkage*) antar satu dengan yang lainnya dan serta merta menjadi tanggungan, baik untuk Pemerintah/Pemda, masyarakat, orangtua siswa. Namun, perlu dipahami seiring dengan gejolak biaya dan kebutuhan masyarakat saat ini, Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai sistem pembiayaan subsidi silang yang diprioritaskan untuk siswa yang secara ekonomi kurang mampu dan tidak memiliki akses kepada pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 52 huruf f, mengenai dana pendidikan satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah melakukan sosialisasikan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang pendidikan sehingga dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ketiga, dari segi teori ekonomi pendidikan, model pendekatan yang paling cocok diimplementasikan menurut penulis adalah model pendekatan *human capital* di mana aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Di dalam model pendekatan *human capital* terdapat hubungan keterkaitan (*linkage*) antar aspek pembiayaan yang dapat mempengaruhi taraf produktivitas, kemudian taraf produktivitas dapat mempengaruhi taraf pendapatan seseorang atau kelompok, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Pustaka Acuan

- Anwar, M. Idochi. 1991. *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*. Mimbar Pendidikan, No. 1 Tahun X, 1991: 28-33.
- Anwar, M. Idochi. 2004. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Blaug, Mark. 1992. *The Methodology of Economics, or How Economic Explain*. New York, Sage Publications.
- Cohn, Elchanan. 1979. *The Economic of Education Revised Edition*. Cambridge: Ballinger Publishing Company.
- Coombs, Philip. H. 1982. *Apakah Perencanaan Pendidikan Itu (terj)*, Bhatara Karya Akasara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*, Jakarta.
- Enoch, Jusuf. 1992. *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta

- Gaffar, M. Fakry. 1991. *Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan*. Mimbar Pendidikan, No. 1 Tahun X, 56 –60.
- Gaffar, M. Fakry. 1987. *Perencanaan Pendidikan, Teori dan Metodeologi*. Jakarta: PPLPTK, Dirjen Dikti Depdikbud.
- Fattah, Nanang. 2006. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Fattah, Nanang. 2000. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Andira
- Fattah, Nanang. 1999. *Studi Tentang Pembiayaan Sekolah Dasar di Bandung*. Disertasi UPI Bandung.
- Fattah, Nanang. 1998. *Landasan Manajemen Pendidikan*. PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Fattah, Nanang. 2009. *Bahan Ajar Mata Kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan*. Jurusan Administrasi Pendidikan, UPI Bandung.
- Gani, Rizanur. 1989/1990. *Strategi Pengajaran Apresiasi Sastra yang Berdimensi Masa Depan*. Panitia Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia serta pengajarannya. IKIP Medan.
- Gaspersz, Vincent. 2003. *Ekonomi Manajerial, Pembuatan Keputusan Bisnis*. Cetakan ke-5, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Iskandar, Uray. 2011. *Faktor Yang Mempengaruhi Biaya*. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2013 dari <http://uray-iskandar.blogspot.com/2011/04/faktor-yang-mempengaruhi-biaya.html>.
- Jones, Thomas. H. 1985. *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Kurniady, Dedy. A. 2005. *Pembiayaan Pendidikan*. Diunduh pada tanggal 5 September 2013 dari http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197106092005011DEDY_ACHMAD_KURNIADY/Pembiayaan_pend/Pembiayaan_Pendidikan.pdf
- Mardiyhanti, Devi. 2010. *Landasan Ekonomi Pendidikan*. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2013 dari http://devimardhiyanti.blogspot.nl/2010/01/bagi-anda-anggota-him-sera-segera_44.html
- Mulyadi. 2005. *Akuntansi Biaya*, edisi 5, Aditya Media: Yogyakarta.
- Mulyadi, Ajang. 2002. *Akuntansi Manajemen*. Bandung: Program Studi Akuntansi UPI.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. 2002. *Pengatur Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Jakarta. Lembaga Penerbit FEUI.
- Samuelson, Paul. A. 1961. *Economics, An Introductory Analysis*. Mac Graw-Hill Kogakusha Co. Ltd, Tokyo, Fifth Edition.
- Simamora, Henry. 2002. *Akuntansi Manajemen*. edisi 2, UPP AMP YKPN, Jakarta.
- Smith, Adam. 1776. *The Wealth of Nations*. The University of Chicago Press, Chicago.
- Sunarto. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Amus.
- Sulistiyoningrum, Nining. 2010. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. dari <http://niningsulistiyoningrum.wordpress.com/2010/05/15/standar-pembiayaan-pendidikan/> Diunduh pada tanggal 27 Maret 2013
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Amandemen

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.

Zyuhendi, Andi. 2013. *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Diunduh pada tanggal 5 September 2013 dari <http://andimpi.blogspot.nl/2013/06/pembiayaan-pendidikan-di-indonesia.html>

<http://budakbedelau.blogdetik.com/2013/07/17/indonesia-wajib-memiliki-pendidikan-murah/> Diunduh pada tanggal 7 September 2013

<http://masyarakatbelajar.wordpress.com/2009/12/13/pembiayaan-pendidikan/> Diunduh pada tanggal 25 Oktober 2013

(<http://networkedblogs.com/md5yl>) Diunduh pada tanggal 1 Oktober 2013